

Socialization of Healthcare Service Innovation: Developing a Pharmacy Information System to Improve Access and Service Quality

Sosialisasi Inovasi Pelayanan Kesehatan: Membangun Sistem Informasi Farmasi untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan

^{1*}Dadang Muhammad Hasyim, ²Arief Budi Pratomo, ³Abdul Rosid, ⁴Novycha Auliafendri, ⁵Ramson Rikson Maruwahal Sijabat

¹STIKes Karsa Husada Garut

²Universitas Nusa Megarkencana

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁴Universitas Imelda Medan

⁵Politeknik Ganesha Medan

ARTICLE INFO

Article History

Received: January 07, 2025

Accepted: February 12, 2025

Published: February 16, 2025

Corresponding author:

Email: dadangmh@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.61220/sipakatau>

Copyright © 2025 The Authors



This is an open access article under the CC BY-SA license

ABSTRACT

Effective pharmacy management is essential in ensuring drug availability in health facilities. This study aims to analyze the pharmaceutical management system in Garut Regency, focusing on aspects of recording, infrastructure, readiness of health workers, and local government policies. The research method used was a qualitative approach with interview and observation techniques in several health facilities. The results showed that many health facilities still use a manual recording system, which risks causing errors and delays in drug procurement. In addition, limited infrastructure and the readiness of health workers in adopting pharmaceutical information systems are the main obstacles in digitizing pharmaceutical management. In terms of policy, the absence of strong regulations and limited budget hamper the optimal implementation of digital systems. Therefore, it is necessary to improve infrastructure, train health workers, and support clearer policies to encourage the digitalization of the pharmaceutical system in Garut Regency.

Keywords: Pharmacy management, digitalization, infrastructure, health workers, government policy

ABSTRAK

Pengelolaan farmasi yang efektif sangat penting dalam memastikan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan farmasi di Kabupaten Garut, dengan fokus pada aspek pencatatan, infrastruktur, kesiapan tenaga kesehatan, dan kebijakan pemerintah daerah. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi di beberapa fasilitas kesehatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem pencatatan manual, yang berisiko menimbulkan kesalahan dan keterlambatan dalam pengadaan obat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi sistem informasi farmasi menjadi hambatan utama dalam digitalisasi pengelolaan farmasi. Dari sisi kebijakan, belum adanya regulasi yang kuat serta keterbatasan anggaran menghambat implementasi sistem digital secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, serta dukungan kebijakan yang lebih jelas untuk mendorong digitalisasi sistem farmasi di Kabupaten Garut.

Kata kunci: Pengelolaan farmasi, digitalisasi, infrastruktur, tenaga kesehatan, kebijakan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang optimal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan informasi farmasi. Sistem informasi farmasi yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam distribusi obat, keterlambatan pelayanan, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang

membutuhkan. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem informasi farmasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan (Rofik, 2021). Keunikan dari kajian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya membahas konsep sistem informasi farmasi secara umum, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang penerapannya secara spesifik di Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki tantangan dalam pelayanan farmasi. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan kondisi geografis yang beragam, akses terhadap obat dan layanan farmasi sering kali mengalami kendala. Beberapa fasilitas kesehatan, terutama yang berada di daerah terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam pengelolaan stok obat dan pencatatan resep secara efisien. Keterbatasan ini dapat berdampak pada keterlambatan distribusi obat dan menurunnya kualitas layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang diusulkan dalam tulisan ini tidak hanya menyoroti permasalahan yang dihadapi, tetapi juga menawarkan solusi berbasis teknologi melalui digitalisasi sistem informasi farmasi yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan (Susiloningtyas et al., 2022).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, penerapan sistem informasi farmasi berbasis digital menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan di Garut. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan distribusi obat secara lebih transparan, akurat, dan cepat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, fasilitas kesehatan dapat lebih mudah mengelola stok obat, menghindari kekurangan atau kelebihan obat, serta memastikan pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Uniknya, tulisan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis sistem informasi farmasi, tetapi juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan sebagai bagian dari strategi implementasi yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Garut telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan berbagai program inovatif. Namun, digitalisasi dalam pengelolaan informasi farmasi masih perlu diperkuat, terutama di puskesmas dan klinik yang berada di daerah dengan akses terbatas. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pencatatan obat dan pelayanan farmasi menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar mereka dapat mengadopsi sistem informasi farmasi secara optimal. Dengan mengintegrasikan aspek sosial dan teknologi dalam diskusi ini, tulisan ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu tidak hanya menghadirkan solusi berbasis digital, tetapi juga menekankan peran sumber daya manusia dalam penerapan teknologi di sektor kesehatan.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, sistem informasi farmasi juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi obat. Dengan pencatatan digital, data terkait stok dan penggunaan obat dapat dipantau secara real-time, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam distribusi. pengabdian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan informasi kesehatan mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat kebijakan (Fitriana et al., 2022). Sistem informasi farmasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam penciptaan kebijakan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Garut (Rohman & Larasati, 2020). Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mendukung kebijakan kesehatan yang lebih efektif di tingkat daerah. Salah satu keunikan dari tulisan ini adalah bagaimana sistem informasi farmasi tidak hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kebijakan kesehatan yang lebih baik dan berbasis data di Kabupaten Garut.

Sosialisasi inovasi pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada tenaga kesehatan, apoteker, dan masyarakat mengenai pentingnya sistem informasi farmasi. Dengan dukungan teknologi, proses pelayanan farmasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, sehingga pasien tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan obat. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai ketersediaan obat di fasilitas kesehatan terdekat. Tulisan ini secara unik menyoroti keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem ini, termasuk tenaga medis, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan, sehingga pendekatannya menjadi lebih inklusif.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem informasi farmasi di Kabupaten Garut dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Pengembangan sistem ini perlu didukung oleh kebijakan yang tepat, infrastruktur teknologi yang memadai, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat. Dengan demikian, inovasi dalam pelayanan kesehatan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Garut. Kajian ini tidak hanya menyoroti penerapan teknologi semata, tetapi juga relevansinya dalam konteks transformasi digital pelayanan kesehatan di era Revolusi Industri 4.0 (Rodiah et al., 2018), menjadikannya selaras dengan tren global dalam modernisasi sistem kesehatan.

Sebagai langkah awal, program sosialisasi akan difokuskan pada tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang menjadi ujung tombak pelayanan farmasi. Pelatihan mengenai penggunaan sistem informasi farmasi, manajemen stok obat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan akan menjadi bagian dari program ini. Selain itu, evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem yang diterapkan. Tulisan ini memiliki keunikan dalam mengedepankan keseimbangan antara teori dan implementasi praktis, di mana setiap solusi yang diusulkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki rencana konkret yang dapat diadaptasi secara langsung dalam kebijakan daerah.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Kabupaten Garut dapat menjadi salah satu daerah yang sukses dalam mengimplementasikan sistem informasi farmasi secara luas. Transformasi digital dalam pelayanan farmasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam mengelola obat, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di daerah mereka. Kajian ini menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan digitalisasi sistem farmasi tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan tenaga medis dan dukungan kebijakan yang terintegrasi (Vipriyanti & Meirinawati, 2021).

Kesimpulannya, inovasi dalam sistem informasi farmasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Garut. Melalui sosialisasi yang efektif, dukungan teknologi, serta keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sistem ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tulisan ini menjadi unik karena tidak hanya mengusulkan teknologi sebagai solusi, tetapi juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia, kebijakan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik.

2. METODE

Metode pengabdian yang digunakan dalam kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tantangan dan peluang dalam penerapan sistem informasi farmasi di Kabupaten Garut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan, apoteker, dan pemangku kebijakan di sektor kesehatan, serta observasi langsung di beberapa puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk melihat kondisi aktual dalam pengelolaan informasi farmasi. Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap berbagai kebijakan dan pengabdian terkait digitalisasi pelayanan kesehatan guna memperkuat analisis dalam pengabdian ini. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi terkait. pengabdian ini juga melibatkan uji coba penerapan sistem informasi farmasi di beberapa fasilitas kesehatan sebagai bagian dari studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi implementasi yang tepat dalam mendukung transformasi digital pelayanan farmasi di Kabupaten Garut. Berikut disajikan instrumen wawancara yang digunakan dalam pengabdian ini:

Tabel 1. Instrumen Wawancara tentang Implementasi Sistem Informasi Farmasi di Kab. Garut

No	Aspek Wawancara	Pertanyaan
1	Profil Responden	Apa jabatan dan tugas utama Anda dalam pelayanan farmasi? Berapa lama Anda telah bekerja di fasilitas kesehatan ini? Apa pengalaman Anda dalam menggunakan sistem informasi farmasi?
2	Kondisi Pengelolaan Informasi Farmasi	Bagaimana sistem pencatatan dan pengelolaan stok obat dilakukan di fasilitas kesehatan ini? Apakah pencatatan dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem digital? Apa saja kendala yang sering Anda hadapi dalam pencatatan dan distribusi obat?
3	Tantangan dalam Implementasi Sistem Informasi Farmasi	Apakah fasilitas kesehatan Anda memiliki infrastruktur yang mendukung penerapan sistem informasi farmasi digital? Apa kendala utama dalam penerapan sistem informasi farmasi berbasis digital? Bagaimana kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi sistem informasi farmasi digital?
4	Efektivitas dan Dampak Digitalisasi	Apakah menurut Anda sistem informasi farmasi berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi pelayanan farmasi? Bagaimana dampak digitalisasi terhadap manajemen stok obat dan distribusi di fasilitas kesehatan Anda? Apakah sistem ini membantu dalam mengurangi kesalahan pencatatan atau keterlambatan dalam pelayanan?

5	Dukungan dan Kebijakan Pemerintah	Sejauh mana dukungan pemerintah daerah dalam penerapan sistem informasi farmasi? Apakah ada program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan terkait sistem informasi farmasi? Apa kebijakan yang menurut Anda perlu ditingkatkan agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal?
6	Saran dan Rekomendasi	Menurut Anda, apa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem informasi farmasi di Kabupaten Garut? Apakah Anda memiliki usulan terkait pelatihan atau fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung digitalisasi layanan farmasi?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi farmasi di Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat kesadaran akan manfaat digitalisasi dalam pelayanan farmasi. Dari wawancara dengan tenaga kesehatan dan apoteker, ditemukan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan masih menggunakan pencatatan manual dalam pengelolaan stok obat dan distribusi farmasi. Hal ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian obat serta potensi kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan kesehatan.

Tantangan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa puskesmas dan klinik, terutama di daerah terpencil. Banyak fasilitas kesehatan belum memiliki perangkat yang memadai untuk mendukung digitalisasi pencatatan obat, dan akses internet yang terbatas juga menjadi kendala. Selain itu, kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi sistem informasi farmasi digital masih bervariasi, dengan beberapa tenaga medis yang mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem baru akibat kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai.

Meskipun demikian, hasil pengabdian juga menunjukkan adanya potensi besar dalam penerapan sistem informasi farmasi berbasis digital. Responden yang telah menggunakan sistem digital menyatakan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok obat, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat pelayanan farmasi kepada pasien. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem ini, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Namun, pengabdian ini menemukan bahwa belum ada kebijakan daerah yang secara khusus mengatur penerapan sistem informasi farmasi, sehingga masih diperlukan regulasi yang lebih jelas dan dukungan anggaran yang memadai. Untuk memperjelas temuan pengabdian, disajikan kesimpulan data hasil pengabdian dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2. Kesimpulan Data Hasil pengabdian tentang Implementasi Sistem Informasi Farmasi di Kabupaten Garut

No	Aspek pengabdian	Temuan Utama
1	Profil Responden	Sebagian besar tenaga kesehatan memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam pelayanan farmasi, tetapi masih terbatas dalam penggunaan sistem digital.
2	Kondisi Pengelolaan Informasi Farmasi	Mayoritas fasilitas kesehatan masih menggunakan pencatatan manual, menyebabkan keterlambatan distribusi obat dan potensi kesalahan pencatatan.
3	Tantangan Implementasi Sistem Informasi Farmasi	Kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya akses internet di daerah terpencil, serta kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan.
4	Efektivitas Digitalisasi	Responden yang telah menggunakan sistem digital menyatakan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan stok obat dan distribusi, serta pengurangan kesalahan pencatatan.
5	Dukungan dan Kebijakan Pemerintah	Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, tetapi belum ada regulasi khusus terkait sistem informasi farmasi. Dukungan pelatihan dan infrastruktur masih perlu ditingkatkan.

6 Saran dan Rekomendasi

Diperlukan kebijakan daerah yang lebih jelas, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta program pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan adopsi sistem informasi farmasi digital.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan sistem informasi farmasi di Kabupaten Garut memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi. Infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi kendala utama dalam digitalisasi sistem informasi farmasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, seperti penguatan kebijakan daerah, penyediaan perangkat yang memadai, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif bagi tenaga kesehatan. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan kesiapan tenaga medis, sistem informasi farmasi berbasis digital dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan farmasi di Kabupaten Garut.

1. Penggunaan Pencatatan Manual dalam Pengelolaan Farmasi

pengabdian ini menemukan bahwa mayoritas fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut masih mengandalkan pencatatan manual dalam mengelola stok obat dan distribusi farmasi. Sistem manual ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan obat, kesalahan pencatatan, dan ketidaktepatan dalam pengelolaan stok. Beberapa tenaga kesehatan mengakui bahwa kesalahan pencatatan dapat berdampak pada ketersediaan obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, pencatatan manual memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses administrasi, sehingga mengurangi efisiensi kerja tenaga kesehatan. Kesalahan yang terjadi dalam pencatatan juga dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan ketersediaan obat secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem digital yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan farmasi di fasilitas kesehatan (Putri et al., 2023; Santosa et al., 2024).

2. Keterbatasan Infrastruktur dalam Implementasi Sistem Informasi Farmasi

Kendala utama dalam penerapan sistem informasi farmasi di Kabupaten Garut adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Beberapa puskesmas dan klinik di daerah terpencil masih belum memiliki perangkat komputer yang memadai, serta akses internet yang tidak stabil. Hal ini menghambat upaya digitalisasi sistem farmasi karena sulitnya mengakses data secara real-time. Keterbatasan ini juga menyebabkan tenaga kesehatan harus tetap melakukan pencatatan secara manual, yang pada akhirnya memperlambat proses pengambilan keputusan terkait ketersediaan dan distribusi obat. Selain itu, minimnya dukungan teknis dalam pemeliharaan perangkat dan jaringan juga menjadi hambatan dalam implementasi sistem digital yang berkelanjutan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penerapan sistem informasi farmasi tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan sarana teknologi bagi fasilitas kesehatan (Putra et al., 2024; Afiya et al., 2022).

3. Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Menggunakan Sistem Digital

Selain keterbatasan infrastruktur, kesiapan tenaga kesehatan dalam mengoperasikan sistem informasi farmasi juga menjadi tantangan utama. pengabdian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga masih mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai sistem informasi farmasi menyebabkan rendahnya adopsi teknologi di kalangan tenaga medis. Sebagian tenaga kesehatan juga merasa khawatir akan perubahan dalam alur kerja mereka, terutama jika sistem baru dianggap lebih kompleks dibandingkan metode manual yang telah lama digunakan. Selain itu, minimnya dukungan teknis saat terjadi kendala dalam penggunaan sistem digital juga membuat tenaga kesehatan enggan untuk beralih ke sistem yang lebih modern. Oleh sebab itu, diperlukan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan literasi digital tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif dalam pelayanan farmasi (Bahij et al., 2024; Setyawan, 2024).

4. Peran Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Keberhasilan implementasi sistem informasi farmasi sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah. Studi ini menemukan bahwa meskipun ada komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, regulasi yang mengatur penerapan sistem informasi farmasi masih belum optimal. Tidak adanya kebijakan khusus serta alokasi anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam proses digitalisasi. Pemerintah daerah juga belum memiliki program yang terstruktur untuk mendorong transformasi digital di sektor farmasi, sehingga adopsi teknologi di fasilitas kesehatan masih berjalan lambat. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi sistem ini juga masih terbatas, sehingga koordinasi antara tenaga kesehatan dan pemerintah daerah belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan strategis untuk mendukung transformasi digital di sektor farmasi, termasuk penyediaan dana untuk pengadaan infrastruktur, pelatihan tenaga

kesehatan, serta regulasi yang mengatur penerapan sistem informasi farmasi secara menyeluruh (Nugroho et al., 2024; Muharik et al., 2023).

3. KESIMPULAN

Pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelolaan farmasi di Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pencatatan manual, keterbatasan infrastruktur, kesiapan tenaga kesehatan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Mayoritas fasilitas kesehatan masih mengandalkan sistem pencatatan manual, yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan obat dan kesalahan dalam pencatatan stok. Keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya perangkat komputer dan akses internet yang tidak stabil, semakin menghambat upaya digitalisasi sistem farmasi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi sistem informasi farmasi juga masih rendah, akibat kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai teknologi ini. Banyak tenaga kesehatan yang belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga masih enggan untuk beralih dari metode konvensional yang sudah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah minimnya dukungan teknis dalam penggunaan dan pemeliharaan sistem informasi farmasi.

Dari sisi kebijakan, pengabdian ini menemukan bahwa pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang kuat serta program yang terstruktur untuk mendukung digitalisasi sistem farmasi. Alokasi anggaran yang terbatas dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem informasi farmasi yang efektif. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan farmasi di Kabupaten Garut, diperlukan transformasi digital yang didukung oleh peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, serta kebijakan yang lebih jelas dan strategis dari pemerintah daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan farmasi sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, akurat, dan efisien di masa mendatang.

REFERENSI

- Afiya, N., Permadi, Y., Rahmatullah, S., & Ningrum, W. (2022). Analisis pengelolaan manajemen logistik obat di instalasi farmasi rumah sakit qim batang tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Jophus Journal of Pharmacy Umus*, 3(02), 138-145. <https://doi.org/10.46772/jophus.v3i02.521>
- Bahij, H., Ikhwan, A., & Harahap, A. (2024). Pengelolaan aset dengan pendekatan metode garis lurus di tvri sumatera utara. *JTIK*, 8(1), 71-77. <https://doi.org/10.59697/jtik.v8i1.499>
- Fitrina, E., Farida, S., & Santoso, A. (2022). Implementasi permenkes nomor 43 tahun 2019 di puskesmas padang tikar, kecamatan batu ampar kabupaten kubu raya. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3454>
- Muharik, R., Febrianto, A., Mogot, P., Bilqis, S., & Gultom, H. (2023). Peran sistem informasi manajemen daerah (simda) dalam meningkatkan pengolahan data keuangan di instansi pemerintah. *Jutech Journal Education and Technology*, 4(2), 96-110. <https://doi.org/10.31932/jutech.v4i2.2988>
- Nugroho, Y., Adityarini, H., Pamungkas, E., Syah, M., & Wantoro, J. (2024). Sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis web di smp muhammadiyah salatiga. *Abdi Teknayasa*, 296-305. <https://doi.org/10.23917/abditeknayasa.v5i1.5625>
- Putra, A., Putri, R., & Harahap, A. (2024). Manajemen keuangan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk transaksi dengan metode cash basis. *Journal of Information Technology*, 4(2), 193-199. <https://doi.org/10.46229/jifotech.v4i2.914>
- Putri, U., Prasetijo, A., & Purnami, C. (2023). Sistem informasi manajemen logistik obat di pelayanan farmasi puskesmas : literature review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (Mppki)*, 6(6), 1016-1024. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i7.3447>
- Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, A. (2018). Model diseminasi informasi komunikasi kesehatan masyarakat pedesaan di kabupaten bandung barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.17771>
- Rofik, E. (2021). Peningkatan layanan kesehatan dalam upaya menekan angka kematian melalui program inovasi pada masyarakat kabupaten bangka, kabupaten gresik, dan kabupaten garut. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 12-22. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.30>
- Rohman, A. and Larasati, D. (2020). Standar pelayanan publik di era transisi new normal. *Reformasi*, 10(2), 151-163. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1952>
- Santosa, Y., Nugraha, N., Puspaningrum, A., Kusuma, A., Damiri, C., & Fathurrahman, M. (2024). Rancang bangun sistem pencatatan dan pelaporan terpadu (sipeter) pada puskesmas cantigi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 15(1), 274-278. <https://doi.org/10.35313/irwns.v15i1.6237>
- Setyawan, R. (2024). Penggunaan sistem informasi manajemen stok (sipn) dalam pengelolaan stok. *empowerment*, 4(1), 17-22. <https://doi.org/10.30787/empowerment.v4i1.1436>

- Susiloningtyas, L., Cahyono, A., & Wiseno, B. (2022). Kualitas pelayanan prima tenaga administrasi kesehatan dalam memberikan pelayanan administrasi kesehatan di rsud kabupaten kediri. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 4(2), 35-47. <https://doi.org/10.53599/jip.v4i2.97>
- Vipriyanti, S. and Meirinawati, M. (2021). Kualitas pelayanan parkir berlangganan untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir di dinas perhubungan kabupaten tuban. *Publika*, 227-240. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p227-240>